

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN USAHA KECIL, MENENGAH PADA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI

Oleh:
Gusti Ayu Oktaviani
Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar.

A
B
S
T
R
A
K

Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UKM) Provinsi Bali dalam Pemberdayaan dan Pembinaan Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi Bali, sesuai dengan yang tertuang dalam RENSTRA, diharapkan dapat mendorong terwujudnya UKM sebagai kekuatan perekonomian dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan pelaksanaan pemberdayaan UKM serta faktor pendukung dan faktor penghambatnya. Fokus permasalahan penelitian ini adalah (1) pelaksanaan pemberdayaan dan pembinaan UKM (2) faktor pendukung dan faktor penghambat. Pemberdayaan dan pembinaan UKM dilakukan dalam upaya menentukan kebijakan yang paling tepat yang didasarkan pada kondisi di daerahnya. Kondisi tersebut di atas melatarbelakangi penelitian ini dalam rangka mengetahui (1) bagaimanakah implementasi kebijakan dalam pemberdayaan dan pembinaan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Provinsi Bali; (2) faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan dalam pemberdayaan dan pembinaan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Provinsi Bali dan bagaimana solusinya; dan (3) bagaimanakah upaya untuk meningkatkan keberhasilan pemberdayaan dan pembinaan Usaha Kecil Menengah di Provinsi Bali.

Kata Kunci: Usaha Kecil Menengah, Implementasi Kebijakan Pemberdayaan.

Departement Cooperative, Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs) of Bali in the Empowerment and Development of Small and Medium Enterprises in the province of Bali, in accordance with that stated in the Strategic Plan, is expected to promote the establishment of SMEs as the strength of the economy and to improve the welfare of society. The purpose of this study was to determine and describe the implementation of the empowerment of SMEs as well as factors supporting and inhibiting factors. The focus of the research problems are (1) the implementation of the empowerment and development of SMEs (2) factors supporting and inhibiting factors. Empowerment and development of SMEs conducted in order to determine the most appropriate policy based on the conditions in the region. The above conditions underlying this study in order to determine (1) how the implementation of policies in the empowerment and development of Small and Medium Enterprises (SMEs) in the province of Bali; (2) the factors that influence policy implementation in the empowerment and development of Small and Medium Enterprises (SMEs) in the province of Bali and how the solution; and (3) how efforts to improve the success of the empowerment and development of Small and Medium Enterprises in the province of Bali.

Keywords: Small and Medium Enterprise, Empowerment Policy Implementation.

A
B
S
T
R
A
C
T

A. PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan sebuah perubahan menuju arah yang lebih baik, dilakukan secara terus menerus dan terencana. Pembangunan di Negara Indonesia yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakatnya sesuai dengan UUD 1945 Pasal 33 (1). Usaha Kecil Menengah (UKM) merupakan salah bentuk sistem ekonomi kerakyatan, dengan demikian UKM secara signifikan menyumbang ekonomi suatu Negara, baik dari sisi penyerapan tenaga kerjanya maupun dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonominya.

Pemerintah sebagai salah satu stakeholder pengembangan UKM seharusnya bersinergi dengan pihak swasta dalam proses pendampingan dan pengembangan ini sehingga sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil.

Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang dimiliki UKM, Pemerintah Daerah Provinsi Bali menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Perda ini juga didasari pertimbangan pengembangan Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi Bali memiliki beberapa keunggulan komparatif terhadap usaha besar. Keunggulan tersebut antara lain dilihat dari sisi permodalan, pengembangan usaha kecil memerlukan modal usaha yang relatif kecil dibanding usaha besar. Disamping itu juga teknologi yang digunakan tidak perlu teknologi tinggi, sehingga pendiriannya relatif mudah dibanding usaha besar.

Oleh karena itu Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Bali mempunyai tugas desentralisasi di bidang koperasi usaha, mikro, antara lain:

1. Penetapan kebijakan pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah dalam pertumbuhan iklim usaha bagi Usaha, Kecil dan Menengah di Provinsi Bali melalui kemitraan.
2. Pengawasan, monitoring dan evaluasi upaya pemberdayaan UKM di Provinsi Bali.
3. Penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil produksi UKM.
4. Pelaksanaan dan fasilitas kebijakan Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi Bali.

Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Provinsi memfasilitasi pelatihan teknis manajemen dan keterampilan untuk pengusaha kecil, memfasilitasi permodalan bagi usaha kecil dan menengah dalam pemberdayaan dan pembinaan UKM serta mengadakan promosi usaha dan fasilitasi pemasaran.

B. METODE

Pada penelitian ini, peneliti mempergunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipergunakan untuk menggali fenomena tertentu secara cermat untuk menjawab pertanyaan penelitian. Melalui pendekatan kualitatif diharapkan, peneliti mampu menggali secara mendalam dan selektif data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari informan

Informan yang dipilih berdasarkan pada karakteristik situasi sosial dengan mempertimbangkan apa yang diketahui sesuai dengan data dan informasi yang dibutuhkan. Penentuan informan dilakukan dengan purposive sampling yaitu teknik pengambilan sample sumber data dengan pertimbangan berdasarkan tujuan tertentu, hanya dipilih informan yang memenuhi syarat atau kriteria terkait dengan data dan informasi yang diperlukan oleh peneliti.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Bali pada dasarnya merupakan kebijakan yang berasal dari kebijakan Pemerintah Pusat, dalam hal ini adalah Kementrian Koperasi dan UKM. Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Bali hanya melaksanakan apa yang telah ditetapkan dari tingkat pusat. Akan tetapi, tidak semua kebijakan yang ada tersebut diterapkan di Provinsi Bali. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan kebijakan tersebut disesuaikan dengan kondisi di daerah serta tersedianya anggaran yang dialokasikan.

Kebijakan Pemberdayaan dan pembinaan UKM tersebut secara garis besar terdiri dari kebijakan Perkuatan, Pemberdayaan, dan Perlindungan. Kebijakan tersebut selanjutnya diimplementasikan lebih lanjut ke dalam program dan kegiatan berikut ini :

1. Perkuatan melalui Pemberdayaan dan pembinaan dalam program pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UKM melalui penyelenggaraan Promosi Produk UKM. Salah satu masalah besar yang dihadapi dalam pemberdayaan dan pembinaan UKM adalah rendahnya akses UKM terhadap pasar.
2. Pemberdayaan melalui Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM. Program ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia UKM yang tangguh dan mempunyai jiwa wirausaha.
3. Pemberdayaan dan pembinaan melalui Program Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif. Tujuan dari program ini adalah terwujudnya perubahan perilaku gerakan UKM sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sasaran yang akan dicapai adalah meningkatnya perubahan perilaku UKM dalam berusaha untuk melaksanakan dan mentaati peraturan yang berlaku, sehingga terjalin hubungan

yang harmonis antara pelaku usaha dengan Pemerintah selaku pembina.

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam pemberdayaan dan pembinaan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Provinsi Bali dan solusinya. Pada rumusan ini digunakan Teori Van Meter Van Horn (1999:445-448) yang menyatakan bahwa suatu implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh faktor-faktor (a) standar dan sasaran kebijakan; (b) sumber daya; (c) komunikasi; (d) karakteristik agen pelaksana; (e) disposisi implementor; dan (f) lingkungan kondisi sosial, ekonomi dan politik yang diuraikan sebagai berikut:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan untuk pengembangan UKM oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Bali telah jelas diuraikan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Terkait dengan salah satu upaya dalam pemberdayaan dan pembinaan bagi UKM, sesuai dengan pasal 19 Perda Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2012 adalah kemitraan, melalui kemitraan ini Gubernur memfasilitasi hubungan kemitraan antara koperasi dan UKM dalam berbagai bentuk dan bidang usaha dengan berbagai badan usaha. Kemitraan dapat dilakukan dengan pola:

- a. Inti plasma;
- b. sub kontrak;
- c. dagang umum;
- d. waralaba;
- e. keagenan; dan/atau
- f. bentuk lain.

Selama ini Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Bali belum sepenuhnya melaksanakan ketentuan tersebut, Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Bali terkesan masih menunggu bola atau instruksi dari Gubernur atau dari Pemerintah Pusat. Untuk mengatasinya, di masa depan Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Bali harus lebih aktif lagi dalam pengembangan UKM di Provinsi Bali.

2. Sumber Daya

Terkait dengan sumber daya dapat ditinjau dari 2 (dua) sisi yaitu sumber daya dari Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Bali dan sumber daya yang dimiliki oleh

UKM-UKM di Provinsi Bali, khususnya sumber daya manusia dapat dikatakan bahwa jumlah personil pegawai yang ada, jika dikaitkan dengan luasnya wilayah serta besarnya sentra binaan yang menjadi kewenangan yang tidak sebanding atau tidak memadai.

3. Komunikasi

Kebijakan pengembangan UKM di Provinsi Bali adalah sosialisasi program dan koordinasi antar lembaga/instansi di Provinsi Bali. Komunikasi menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas kebijakan maka akan mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan dalam mengaplikasikan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya. Dalam hal ini komunikasi dapat diamati dari metode komunikasi atau sosialisasi kebijakan yang digunakan, dan intensitas komunikasi itu dilakukan (Van Meter Van Horn, 1999:445-448).

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Agen pelaksana dalam hal implementasi kebijakan pemberdayaan dan pembinaan UKM, seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa karakteristik agen pelaksana ini belum optimal. Dikatakan demikian karena kompetensi agen pelaksana belum memadai untuk melakukan pemberdayaan dan pembinaan seluruh UKM yang ada di Provinsi Bali.

5. Disposisi Implementor

Implementor yang dimaksudkan disini adalah Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Bali. Dalam rangka untuk mengembangkan UKM di Provinsi Bali khususnya untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang dimiliki UKM, Pemerintah Daerah Provinsi Bali menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan, Pemberdayaan dan Pembinaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

6. Lingkungan Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Lingkungan sosial merupakan salah satu lingkungan yang berpengaruh kuat terhadap aktivitas usaha kecil dan menengah (UKM), yang akan menentukan apakah UKM tersebut akan berkembang atau tidak.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil uraian yang telah dijabarkan mulai dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan hasil penelitian serta pembahasan, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemberdayaan dan pembinaan UKM pada Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Bali pelaksanaannya merupakan implikasi dari kebijakan yang telah ditetapkan, yaitu kebijakan Pemerintah Pusat, dalam hal ini adalah Kementerian Koperasi dan UKM. Dinas Koperasi

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Bali hanya melaksanakan apa yang telah ditetapkan dari tingkat pusat. Akan tetapi, tidak semua kebijakan yang ada tersebut diterapkan di Provinsi Bali

2. Implementasi kebijakan dalam pemberdayaan dan pembinaan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Provinsi Bali dilakukan dengan cara (a) perkuatan melalui program pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM yang meliputi sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan bagi UKM dan penyelenggaraan promosi produk UKM; (b) pemberdayaan melalui program kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM dengan cara penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan bagi UKM.

Implementasi kebijakan dalam pemberdayaan dan pembinaan Usaha Kecil Menengah (UKM) di Provinsi Bali sangat dipengaruhi oleh beberapa factor diantaranya : (a) standar dan sasaran kebijakan; (b) sumber daya; (c) komunikasi; (d) karakteristik agen pelaksana; (e) disposisi implementor; dan (f) lingkungan kondisi sosial, ekonomi dan politik. Sedangkan faktor-faktor yang menghambatnya adalah sumber daya manusia dan akses pasar.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku – buku

Anderson, James E, 2005. *Public Policy Making-An Introduction. (second edition)*. Texas A & M University.

Anonim (2015). Perjanjian Kerjasama Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Provinsi Bali dengan PT. Hardys Retailindo Denpasar Bali.

Departemen KUMKM. 2005. *Rencana Strategis Pembangunan KUKM*. Jakarta: Departemen KUMKM RI.

Edwards III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washinton: Cogressional Quaerterly Inc.

Kementerian UMKM dan Koperasi (2014) , *Rencana Kerja Pemerintah Bidang Pemberdayaan UMKM dan Koperasi*.

Nakamura, Robert. T dan Frank Smallwood. 1980. *The Politics of Policy Implementation*. New York : St Martin Press.

Sulistiyani, A.T. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Jogjakarta: Gava Media.

Van Meter, Donald, dan Horn, Carl Van. 1999. *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework dalam Administration and Society*. London: Sage.

Jurnal/ Hasil Penelitian Terdahulu.

Abdul Wahab, Solichin. 2011. *Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Afifah, Rifda Zahra dan Achma Hendra Setiawan. 2012. "Analisis Kebijakan Pembinaan bagi Kelompok Pelaku Usaha Mikro oleh Dinas Koperasi dan UMKMKota Semarang" Diponegoro Journal Of Economics. Vol. 1, No. 1, hlm. 1-15.

Indah, Yuliana Putri. 2010. " Analisis Usaha Mikro Monel yang Memperoleh Kredit dari Dinas UMKMKabupaten Jepara (Studi Kasus: Kecamatan Kalinyamatan, Kabupaten Jepara) ". Tesis Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.

Nurhajati. 2014. *Paradigma Baru Pengembangan Usaha Kecil Menengah untuk Meningkatkan Daya Saing Ekonomi*. Malang : UNISMA.

Nurjannah, Siti. 2014. "Efektivitas Implementasi Kebijakan Pengembangan Kewirausahaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru". Jom FISIP, Vol. 1, No. 2, hlm. 1-19.

Priyo, Harsono. 2010. "Analisis Kebijakan Dinas Koprasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah yang berupa Bantuan dalam Rangka Pengembangan UMK Binaan KUB Rukun Mina Barokah di Kecamatan Juwana". Tesis Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.

Suhendar, H. 2002. *Analisis nilai tambah dan Strategi Pengembangan Industri Kecil Tahu Sumedang (Studi Kasus di Bogor, Jawa Barat)* ". Tesis pada Departemen Agribisnis, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor. Bogor.

Tamara, Anastasia. 2013. "Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Manado". Jurnal Administrasi Negara. Vol. 1. No. 5, hlm. 64-79.

Peraturan Perundang – Undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008. *Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2012. *Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Dan Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah*.